

SKRIPSI

**ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN
REALISASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA
(PERFORMANCE-BASED BUDGETING)
PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR**



**HENDRIK PAULUS
1310321078**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE-BASED BUDGETING) PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

**HENDRIK PAULUS
1310321078**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE-BASED BUDGETING) PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BALAI BESAR PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

HENDRIK PAULUS
1310321078

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 9 September 2017

Pembimbing



Andi Dian Novita, S.ST., M.Si

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Muhammad Gafur, S.E., M.Si

SKRIPSI

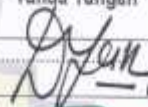



ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE-BASED BUDGETING) PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

HENDRIK PAULUS
1310321078

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 28 Agustus 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Ketua	1. 
2	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., AK., AC	Sekretaris	2. 
3	Afdal, S.E., M.Sc., AK., CA	Anggota	3. 
4	Muhammad Iqbal, S.E., M.Sc., AK., CA	Eksternal	4. 

Ketuan Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR



PRODI AKUNTANSI
Muh. Gatut, S.E., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : HENDRIK PAULUS

NIM : 1310321078

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Proses Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting) Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Makassar", adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Hendrik Paulus

PRAKATA

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Proses Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKI Makassar**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua Paulus Jamal & Elisabeth.S dan wakil sebagai orang tua saya Antonius K.P & Alm.Katerina.P yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya dalam mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan mendoakan agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita. Buat saudara-saudaraku Selviana P, Noviana P, S.E, Alexander P, terima kasih sudah menggandeng tangan saya didalam doa, *thanks for being my spirit partner and pray, For my beloved sister and brother, I really love you. Jesus love you all.*

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak prof. Drs. H. Sadly Abdul Jabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.

2. Ibu Dr. Hj. Hadiati, M.si selaku dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Muhammad Gafur,S.E.,M.Si selaku ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Ibu Andi Dian Novita, S.ST.,M.Si selaku Dosen pembimbing Skripsi. Beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama menjalani penyusunan Sripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar.
6. Bapak Andi Sarifuddin Akbar dan Bapak Hosea S.E selaku pembimbing dalam mengumpulkan data pada Kemkominfo BBPPKI Makassar.
7. *My best partner in spirit.* Dirga, Hasan, Fais, Wiwid, Eccu, Vina, Kenes, Esy yang masih mempercayakan saya dalam membangun persahabatan, kalian semua telah menjadi sahabat yang luar biasa sejak masih culun (Maba). Saya sangat menghargai kehadiran dan semua yang tuhan kerjakan dalam hubungan kita, keberadaan kalian benar-benar melengkapi kehidupanku selama ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk doa, perhatian, semangat, bantuan, nasehat, dan persahabatan yang manis ini. Semoga kita kedepannya akan menjadi sosok seseorang yang sukses dalam cita-cita kita masing-masing dan biarlah persahabatan ini menjadi kekal dalam kehidupan kita selanjutnya. Kiranya Tuhan akan menyempurnakan dan memulihkan segala sesuatu dalam setiap hidup kita.
God bless you guys.
8. Untuk semua sahabat seperjuangan, mulai sahabat dari kecil, sahabat semenjak masa sekolah, sahabat gereja, sahabat KKN, sahabat KKLK, sahabat PMK dan semua sahabat seperjuangan kuliah S1 Akuntansi 2013.

9. Untuk semua keluarga besar tanpa terkecuali, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan Yesus Maha Kuasa melimpahkan kasih dan karunianya yang berlipat untuk segala kebaikan yang telah diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, September 2017

Hormat Saya

BPenulis

ABSTRAK

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE-BASED BUDGETING) PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR

**Hendrik Paulus
Andi Dian Novita**

Dengan keluarnya peraturan pemerintah terkait UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana menyatakan perubahan sistem pengelolaan anggaran berbasis tradisional menjadi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran dengan menggunakan sistem berbasis kinerja lebih menitik beratkan pada aspek manajemen strategis dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran untuk optimalisasi output yang dihasilkan dari suatu input (biaya).

Hasil penelitian ini menunjukkan terkait proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada kementerian komunikasi dan informatika BBPPKI Makassar dimana menerapkan beberapa tahapan dalam penyusunan anggaran sesuai yang ditetapkan oleh kantor pusat sendiri. Dari semua program kerja yang disusun sudah trealisasi dengan baik, dimana menunjukkan nilai capaian yang telah diharapkan dan penggunaan anggaran sudah sangat efektif dan efisien dalam pencapaian setiap program kerjanya.

Kata Kunci: Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja

ABSTRACT

ANALYSIS OF BUDGET PREPARATION PROCESS AND PERFORMANCE-BASED BUDGET REALIZATION AT THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATICS MAJOR CENTER FOR ASSESSMENT AND DEVELOPMENT OF COMMUNICATION AND INFORMATICS OF MAKASSAR

Hendrik Paulus
Andi Dian Novita

With the issuance of law No.17 of 2003 on state finances, which states changes in traditional budget-based management systemsto performance-based budget management. The preparation of the budget by using a performance-based system more focused on aspects of strategic management in the framework of effectiveness and budget efficiency to optimize the output resulting from an input (cost).

The result of this study indicate that performance-based budgeting that has been applied to work unit of the ministry of communications and informatics of the center of assessment and development of communication and informatics of Makassar of all existing work programs show the expected value of achievement where in the budget management has been effective and efficient in achieving the program it works.

Keywords: *budget preparation and performance-based budget realization*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktisi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Anggaran.....	6
2.1.1 Defenisi Anggaran	6
2.1.2 Fungsi Anggaran	8
2.1.3 Karakteristik Anggaran.....	9
2.1.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran.....	9
2.1.5 Siklus Anggaran.....	11
2.2 Anggaran Berbasis Kinerja	11
2.2.1 Konsep Anggaran Berbasis Kinerja	12
2.2.2 Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja.....	13
2.2.3 Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja	14
2.2.4 Kelebihan Dan Kekurangan ABK	14
2.3 Tinjauan Emperik.....	15
2.4 Fokus Penelitian	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Rancangan Penelitian.....	19
3.2 Kehadiran Peneliti	19
3.3 Lokasi Penelitian	20
3.3.1 Sejarah, Visi dan Struktur Organisasi BBPPKI Makassar	20
3.4 Sumber Data	26
3.4.1 Sumber Data Primer	26
3.4.2 Sumber Data Sekunder.....	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5.1 Metode Observasi.....	26
3.5.2 Metode Dokumentasi	27
3.5.3 Metode Wawancara	27
3.6 Pengecekan Validasi Temuan	27
3.8 Tahap-Tahaap Penelitian	28
 BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 30
4.1 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika BBPPKI Makassar.....	 30
4.2 Indikator Dalam Penyusunan Anggaran.....	32
4.3 Jenis Belanja	33
4.4 Pendanaan Anggaran.....	33
4.5 Silapa Anggaran Tahun Berjalan	34
4.6 Analisis Tahun Anggaran Untuk Tahun 2015.....	38
4.7 Analisis Tahun Anggaran Untuk Tahun 2016.....	42
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	44
 DAFTAR PUSTAKA.....	 46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tinjauan Empirik (Penelitian Terdahulu)	15
4.1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja 2015	35
4.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja 2016	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Tahap-Tahap Penelitian.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kerja tidak pernah lepas dari penganggaran suatu kinerja, penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara instansi pemerintah dan instansi swasta. Anggaran adalah rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematis, dalam sebuah organisasi anggaran memegang peran yang sangat penting karena anggaran mengarahkan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks kehidupan bernegara, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk melakukan alokasi sumber daya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih adil dan menjaga stabilitas perekonomian. Dalam menjalankan anggaran, negara pemerintah harus mampu menjamin bahwa anggaran yang dilaksanakan sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan bagi kemakmuran rakyat.

Anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada instansi pemerintah anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 pasal 19 (1) dan (2) menuntut perubahan sistem penganggaran dari *traditional budget* menjadi penganggaran berbasis kinerja. Undang-undang dan peraturan ini mengharuskan digunakannya sistem penganggaran yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu perubahan dari sistem *dual budgeting* menjadi *unified budgeting*, penganggaran dengan basis input menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance based*

budgeting system), sistem ini menggantikan sistem penganggaran tradisional (*traditional budgeting system*) yang mempunyai banyak kelemahan, karena adanya tumpang tindih biaya sehingga berdampak pada tidak efisiennya anggaran.

Tradisional *budgeting system* adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan belanja/pengeluaran. Sistem tradisional ini dapat kita ketahui dengan ciri-ciri seperti kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran dan masalah utamanya yaitu tidak memperhatikan konsep value for money (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas), berbeda dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja mempunyai konsekuensi menitikberatkan pada aspek manajemen strategis dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran untuk optimalisasi *output* yang dihasilkan dari suatu *input* (biaya) tertentu. Penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja harus berdasarkan pertimbangan beban kerja. Pengalokasian dana yang efektif mengandung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan strategik yang di muat dalam dokumen perencanaan strategis. Sedangkan, pengalokasian dana yang efisien mengandung arti bahwa pencapaian sasaran dan tujuan strategis tersebut telah menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan.

Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapat diwujudkan dengan penerapan *performance-based budgeting* dalam penyusunan anggaran pemerintah. Suatu pemerintah dapat dikatakan telah menerapkan bentuk sederhana dari penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) jika

telah menetapkan indikator kinerja untuk mengukur hasil dari pengeluaran anggaran yang dilakukan dan menggunakan indikator tersebut dalam proses atau mekanisme penyusunan anggaran. Hal ini, seperti yang dinyatakan Hou (2010), menunjukkan bahwa desain dari *performance-based budgeting* didasarkan pada pemikiran bahwa memasukan ukuran kinerja dalam anggaran akan mempermudah pemantauan terhadap program untuk melihat seberapa baik pemerintah telah mencapai *outcome* yang dijanjikan dan diinginkan.

Walaupun anggaran berbasis kinerja telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun pada kenyataannya pengelolaan keuangan ini masih belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh belum didukungnya tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah oleh dokumen perencanaan tahunan. Misalnya, antara dokumen renjana strategis dengan rencana kerja dimana sasaran yang ada di rencana strategis belum didukung oleh program dan kegiatan yang ada di rencana kerja. Kondisi sekarang ini masih ada satuan kerja yang menyusun anggaran lebih memberikan perhatian kepada *input (input based)*. Hal ini bisa terlihat dari format dokumen anggaran yang disusun secara *line-item*. Begitu juga halnya pada saat pelaksanaan anggaran masih ada satuan kerja yang berfikir bagaimana menghabiskan anggaran yang tersedia lebih menjadi tujuan dari pada pencapaian target kinerja yang telah disepakati dalam dokumen anggaran. Segala upaya dilakukan untuk menghabiskan dana yang tersedia dalam anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran, masih merupakan fenomena yang sering ditemukan hampir pada semua instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Namun, kondisi ini belum menyentuh masalah penggunaan indikator kinerja pada dokumen anggaran.

Kementrian komunikasi dan informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar, adalah salah satu dari satuan kerja yang bergerak disektor pemerintahan, dimana sangat memungkinkan dalam melakukan penelitian dengan menerapkan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan pemerintah dalam penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja seperti keluarnya peraturan pemerintah menurut UU No.17 Tahun 2003 pasal 19 ayat 1 & 2.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian tentang mengenai “Analisis Proses Penyusunan Anggaran dan Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diteliti adalah bagaimana proses penyusunan anggaran dan realisasi anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran dan realisasi anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan anggaran berbasis kinerja khususnya implementasinya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Bagi penulis

Penulis dapat mengetahui mengenai penyusunan anggaran dan realisasi anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar.

2. Bagi peneliti berikutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat dikembangkan lagi lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis.

3. Bagi publik

Masyarakat dapat mengetahui setiap program-program pemerintah dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

4. Bagi sektor pemerintah yang lainnya

Sebagai bahan masukan tiap sektor pemerintah dalam penggunaan anggaran dengan menggunakan penyusunan anggaran berbasis kinerja setiap program-program kerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran

Nordiawan dan hertianti (2010) anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

2.1.1 Definisi Anggaran Publik

Dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Bagi organisasi yang besar dan telah matang dengan tingkat operasional yang relatif stabil dalam jangka panjang, anggaran merupakan dokumen formal yang sangat terperinci. Anggaran merupakan alat akunting yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran yang digunakan sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian merupakan jalan terbaik bagi pimpinan perusahaan untuk menempatkan suatu organisasi pada arah tertentu.

Anggaran juga merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga anggaran dapat dirancang berdasarkan kondisi perusahaan disesuaikan dengan data tertulis mengenai seluruh kegiatan organisasi perusahaan

yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh beberapa kalangan ahli. Tetapi pengertian tersebut pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Pengertian anggaran menurut Mardiasmo (2009) merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan menurut Bastian (2010) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu, kebanyakan organisasi publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan, contoh anggaran publik antara lain:

1. Anggaran Negara dan Daerah /APBN/APBD.
2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat.

National Committee on Governmental Accounting (NCGA), yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, mendefenisikan anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang di harapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

2.1.2 Fungsi Anggaran Publik

Dalam ruang lingkup akuntansi, seperti dikutip dari Nordiawan & Hertianti (2010) anggaran berada dalam lingkup akuntansi manajemen. Berikut beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Dengan anggaran, organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan dibuat.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan

Arah atas kebijakan tertentu dapat ditentukan melalui anggaran sektor publik. Contohnya apa yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan fiskal, apakah kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

6. Anggaran sebagai alat penilai kinerja

Anggaran suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian. unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

2.1.3 Karakteristik Anggaran Publik

Anggaran harus disusun dan dihitung dengan cermat agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus memiliki karakteristik tertentu. Menurut Bastian (2010) terdiri dari

1. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
2. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
4. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.1.4 Pendekatan Penyusunan Anggaran

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam proses penyusunan anggaran di suatu organisasi, Bastian (2010) melakukan penggolongan pendekatan anggaran:

1. Pendekatan Tradisional (*Incremental Budgeting*)

Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Logika sistem penganggaran ini adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya.

2. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

Planning Programming Budgeting System adalah proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah, yang di dalamnya terkandung indentifikasi tujuan organisasi serta permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan, serta pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. PPBS di anggap terlalu rasional dan tentu saja terlalu mahal sehingga PPBS sulit di laksanakan.

3. Pendekatan *Zero Based Budgeting (ZBB)*

Zero Based Budgeting adalah pendekatan yang menghasilkan berbagai paket alternatif anggaran yang di buat sebagai motivasi atas anggaran organisasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan terhadap fluktuasi jumlah anggaran. Dalam prakteknya ZBB membutuhkan banyak kertas kerja data, serta menuntut penerapan sistem manajemen informasi yang cukup canggih. Hal ini di anggap sebagai hambatan utama dalam penerapan ZBB.

4. Pendekatan Kinerja (*Performance Budgeting*)

Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana

strategis organisasi. Performance Budgeting mengalokasikan sumber daya ke program bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output sebagai indikator kinerja organisasi. Teknik ini adalah penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan biaya unit dari setiap kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaiannya tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja.

2.1.5 Siklus Anggaran

Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap penyusunan renstra anggaran.
2. Tahap pengesahan anggaran.
3. Tahap pelaksanaan anggaran.
4. Tahap pelaporan anggaran.

2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Seperti defenisi anggaran berbasis kinerja yang sudah di sebutkan diatas, pada subbab ini akan disajikan pembahasan yang lebih luas mengenai konsep, ruang lingkup, kelebihan maupun kekurangan dan dasar hukum, elemen-elemen, dan prinsip anggaran berbasis kinerja. Selain itu, pada sub bab ini secara singkat membahas sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) karena anggaran berbasis kinerja erat kaitannya dengan hal tersebut.

2.2.1 Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Sebelum metode Anggaran Berbasis Kinerja diperkenalkan metode penganggaran yang digunakan adalah metode tradisional. Cara penyusunannya tidak didasarkan pada analisis rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun dititik beratkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diteliti apakah dana tersebut telah di gunakan secara efektif dan efisien atau tidak. Tolak ukur keberhasilannya hanya di tunjukkan dengan melihat keseimbangan anggaran antara pendapatan belanja, namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya kemudian muncul metode anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan perencanaan strategis.

Berbeda penganggaran dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan *orientasi output*. Jadi apabila kita menyusun anggaran dengan pendekatan kinerja, maka pola pikir harus fokus pada apa yang ingin dicapai (*output*). Kalau fokus ke *output*, berarti pemikiran tentang tujuan kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerja diperiksa. Jadi, tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah kinerja atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil

yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).

Untuk dapat menyusun anggaran berbasis kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategis (Renstra). Penyusunan rencana strategis dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan dan masyarakat, agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Pengukuran Kinerja (tolak ukur) digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah atau instansi.

2.2.2 Ruang Lingkup Anggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran berbasis kinerja di Indonesia mengikuti beberapa prinsip utama Paterson & Harahap (2010) adalah sebagai berikut:

Dana Mengikuti Fungsi, Fungsi Mengikuti Struktur

Bahwa anggaran akan dialokasikan untuk mendanai sebuah kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari unit kerja. Kegiatan dan langkah-langkah kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit tertentu dalam organisasi, dan menjamin tidak ada tugas atau fungsi organisasi yang di hilangkan dan tidak ada yang dipublikasi. Hal ini memastikan bahwa keluaran atau hasil/manfaat merupakan tanggung jawab unit kerja itu, diantaranya:

1. Biarkan manajer yang mengelola

Bahwa para manajer unit kerja harus memiliki fleksibel yang cukup besar untuk memilih metode pelaksanaan dalam rangka output dan hasil yang ditetapkan untuk unit kerja dan kegiatan tersebut.

2. Akuntabilitas

Bahwa unit juga akan bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil-hasil dan pencapaian efisiensi dan efektivitas yang ditunjukkan oleh indikator yang terkait.

3. Hubungan Antara Perencanaan *top-down* dan pelaksanaan *bottom-up*

Tujuan kebijakan dan perencanaan dicapai melalui otorisasi kegiatan ke unit kerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi, dan unit kerja diberikan anggaran sesuai keperluan dalam rangka mencapai output atau hasil dengan efisiensi dan efektivitas yang tepat.

2.2.3 Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Ismail dan Idris (2009), elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam sistem penganggaran berbasis kinerja adalah:

1. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
2. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat dibandingkan antara biaya dengan prestasinya. Implementasi tentang anggaran berbasis kinerja adalah menyangkut dokumen anggaran, seperti rencana kegiatan anggaran (RKA), pagu anggaran sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Anggaran Berbasis Kinerja

Beberapa kelebihan dalam menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja menurut Bastian (2010):

1. Membantu fungsi perencanaan dan mempertajam pembuatan keputusan.
2. Memungkinkan alokasi dana secara optimal dengan di dasarkan pada efisiensi unit kerja.
3. Menghindarkan pemborosan.

4. Memungkinkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan.
5. Merangsang partisipasi dan memotivasi unit kerja melalui proses pengusulan dan penilaian anggaran yang bersifat factual.

Disamping kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan diatas, anggaran berbasis kinerja, menurut Bastian (2010), juga memiliki kekurangan diantaranya:

1. Tidak semua jelas mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban keputusan tersebut.
2. Tidak semua kinerja diukur secara baik.
3. Tidak semua kegiatan dapat di standarisasikan

2.3 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Tahun	Judul Penelitian	Keterangan
1	Eko Budi Sulistio	2010	Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan)	penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja sebagai upaya pembiayaan program-program pembangunan daerah. Penyusunan anggaran berbasis kinerja ini mendapatkan dukungan politik yang tinggi dari Kepala Daerah maupun legislative daerah (DPRD).

2	Elly Hesrini	2015	Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Gresik	Penyusunan Indikator Anggaran Berbasis Kinerja pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Gresik digunakan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan Keluaran atau Hasil dari kegiatan atau program.
3	Anita Wahyu Wijayanti, Mujibur Rahman Khairul Muluk, Ratih Nurpratiwi	2012	Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan	Penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan masih menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan belum disusunnya ASB sebagai instrume sekaligus tolok ukur anggaran berbasis kinerja serta terlambatnya penyusunan Standar Satuan Harga oleh Bagian Perlengkapan

				dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan kepada SKPD.
4	Reza nanda dan darwanis	2016	Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah	Penerapan anggaran berbasis kinerja pada dinas DPKKD kabupaten Aceh Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
5	Abriyani Puspaningsih	2002	Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Manajer	Partisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja dan kinerja manajer. Dalam hubungan antara partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan kepuasan kerja dan kinerja, ada yang punya hubungan langsung

2.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana proses penyusunan anggaran dan realisasi anggaran berbasis kinerja pada Kementiran Komunikasi Dan Informatika Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan, Komunikasi Dan Informatika Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, merupakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif yaitu dimana suatu pendekatan penelitian komperatif. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang akan diteliti. Menurut Nazir (2005) penelitian komperatif adalah jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi penelitian komperatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti ini harus mampu memahami setiap masalah-masalah yang akan diteliti dan memahami setiap teknik-teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yang akan digunakan. Peneliti juga harus mengungkapkan dengan apa yang dia lihat, dirasakan dan didengar, maka untuk itu perlu dibutuhkan kepandaiaan dalam memahami setiap masalah. Peneliti pula harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang akan ditempati untuk penelitian, maka untuk itu dibutuhkan sikap dan toleran, sabar dan menjadi pengamat yang baik terhadap masalah yang akan diteliti. Menurut Aunu (2013) mengatakan bahwa peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti

melakukan kerja lapangan secara langsung dan bersama beraktifitas dengan orang-orang yang diteliti untuk mengumpulkan data

Penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Juni sampai peneliti sudah merasa cukup terhadap data yang diinginkannya, surat izin penelitian dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar Makassar. Dengan adanya surat izin tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap pimpinan dan staf-saf kantor pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informatika Makassar.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, tempat yang akan diteliti yaitu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informatika Makassar, di mana yang berlokasi Jl. Prof.Dr.Abdurrahman Basalamah II No.25 Makassar, lokasi dari rumah juga tidak begitu sulit dijangkau bagi penulis dan alasan untuk memilih tempat ini yaitu karena penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penganggaran berbasis kinerja, penulis merasa sesuai dengan tempat yang akan diteliti terhadap judul yang akan dikaji.

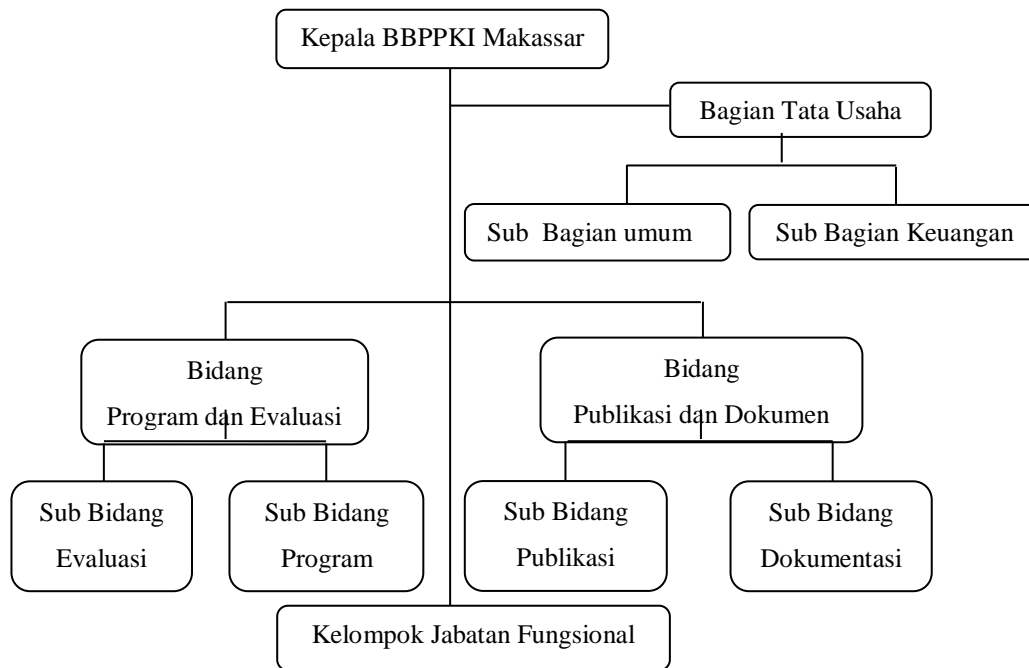
3.3.1 Sejarah, Visi dan Struktur Organisasi BBPPKI Makassar

Keberadaan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) di Makassar, melalui sejarah yang panjang. Kantor yang semula hanya merupakan unit perpustakaan dari Lembaga Pers dan Pendapat Umum (LPPU) untuk kota Makassar, seiring dengan perjalanan sejarah pemerintah

akhirnya berkembang menjadi satu lembaga penelitian yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia – Departement Komunikasi dan Informatika.

Rumusan visi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar merupakan arah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan dalam rangka mencapai visi Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena secara keseluruhan aktivitas BBPPKI Makassar harus memberikan kontribusi dalam perjalanan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang yang bersandar pada visi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rumusan visi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyebar luasan hasil penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika menuju terwujudnya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BBPPKI Makassar

Struktur Organisasi pada Kantor Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian tata usaha BBPPKI Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha Kantor BBPPKI Makassar terdapat Subbagian yang terdiri atas:

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

2) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi Kantor BBPPKI Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dan anggaran di bidang pengkajian dan pengembangan serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

Bidang Program dan Evaluasi Kantor BBPPKI Makassar terdiri atas beberapa subbagian yakni:

1) Subbidang Program

Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengkajian dan pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan

2) Subbidang Evaluasi

Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan di bidang pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan

3. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan publikasi dan pengelolaan hasil pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. Bidang Publikasi dan Dokumentasi Kantor BBPPKI Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan. Bidang Publikasi Kantor BBPPKI Makassar memiliki beberapa subbagian yang terdiri atas:

1) Subbidang Publikasi

Subbidang Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan

2) Subbidang Dokumentasi

Subbidang Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBPPKI mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan dan diperintahkan oleh pimpinan. Adapun tugas yang dilaksanakan pada Kantor BBPKI Makassar sebagai berikut:

- a. Sebagai koordinator jabatan fungsional
- b. Membantu merencanakan kegiatan penelitian
- c. Membantu atau melakukan kegiatan penelitian sendiri di bawah bimbingan
- d. Menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian
- e. Melaksanakan kajian isu publikasi daerah

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

3.4.1 Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber utamanya, adapun sumber data primer didalam penelitian ini adalah pemangku jabatan dan seluruh staf-staf dari karyawan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informatika Makassar.

3.4.2 Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung yang diperoleh atau yang didapatkan peneliti, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan yang diarsip seperti laporan anggaran dan realisasi anggaran serta dokumen-dokumen lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang akan diinginkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penulis melakukan atau menggunakan metode-metode sebagai berikut:

3.5.1 Metode Observasi

Observasi disebut juga proses pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mencatat semua informasi.

3.5.2 Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data dan mengumpulkan semua data-data yang didokumentasikan selama melakukan penelitian ditempat yang akan diteliti.

3.5.3 Metode Wawancara

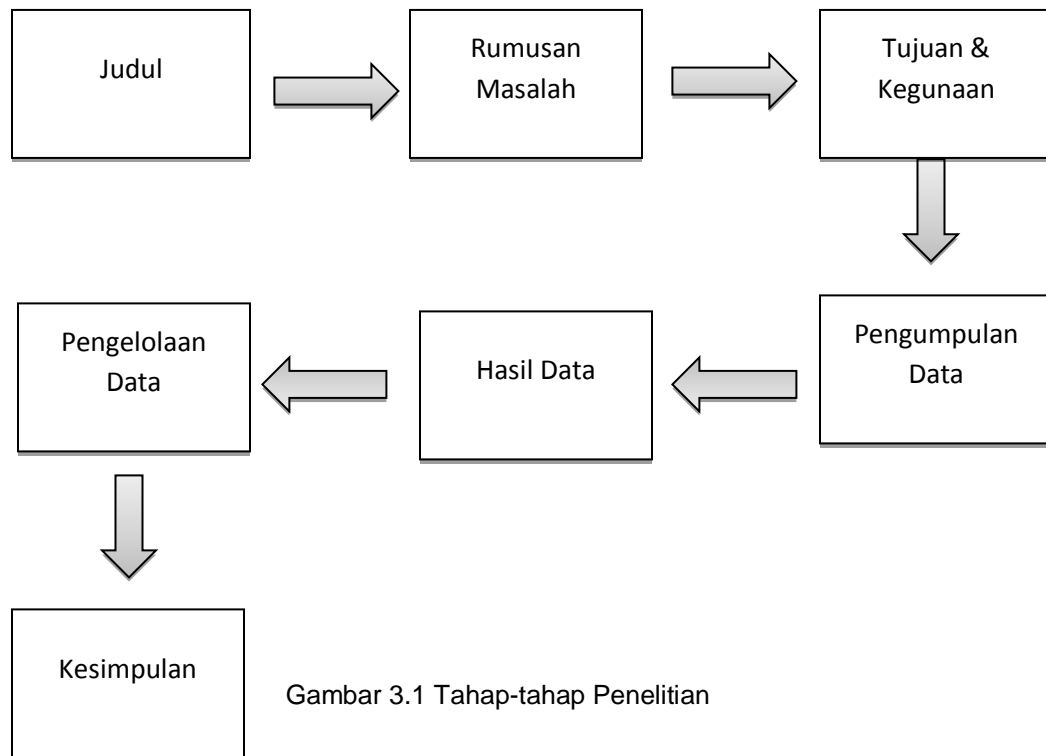
Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.

3.6 Pengecekan Validasi Temuan

Dengan hasil penelitian ini, untuk bisa dipertanggung jawabkan maka secara ilmiah diperlukan adanya pembuktian data untuk melakukan penelitian yaitu;

1. Membandingkan hasil wawancara antara informasi satu dengan informasi lainnya.
2. Menggunakan bahan referensi, yaitu adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan.

3.7 Tahap-Tahap Penelitian Skripsi



Gambar 3.1 Tahap-tahap Penelitian

1. Menentukan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
 Dengan tahapan pertama ini peneliti menetapkan Judul, kemudian mengangkat rumusan masalah penelitian yang menjadi pertanyaan ketertarikan penulis. Dan dari rumusan masalah tersebut kemudian menyebutkan tujuan dari pada keinginan peneliti terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.

2. Pengumpulan Data

Agar mengetahui jawaban atas suatu rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka perlu mengumpulkan data-data yang relevan. Oleh karena itu dalam tahapan ini peneliti melakukan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tersebut, diantaranya dengan melakukan wawancara setiap staf-staf kantor, mendokumentasikan setiap kegiatan, melakukan observasi ke lokasi

penelitian dengan melihat setiap kegiatan-kegiatan kerjanya serta mencari data dari sumber yang bersangkutan.

3. Hasil Data

Dari hasil pengumpulan data yang didapatkan, peneliti menggabungkan setiap data-data yang diperoleh untuk dikelola lebih lanjut

4. Pengelolaan Data

Dari hasil data yang didapatkan peneliti akan merangkum setiap data-data yang didapat dan menerapkan pokok permasalahan yang ditetapkan, pada akhir tahap ini semua data yang relevan di harapkan telah tersusun sesuai kebutuhan yang di perlukan. Maka dapat di simpulkan bahwa analisis data merupakan usaha peneliti untuk menyusun atau menyajikan tulisannya dari hasil data yang di peroleh pada penelitian, yang kemudian dianalisis sesuai kategori yang akan di bahas secara sistematis.

5. Kesimpulan

Dari hasil pengelolaan data dan proses penyusunan atau penyajian data, peneliti akan memahami dengan baik apa dengan hasil penelitiannya, sehingga peneliti mendapatkan yang penting untuk peneliti mengangkat kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika BBPPKI Makassar

Untuk menyusun anggaran setiap program kerja pada kementerian komunikasi dan informatika balai besar pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika makassar dimana dijelaskan oleh salah satu karyawan bagian keuangan oleh Pak Hosea, sebagai berikut.

“dalam menyusun anggaran untuk setiap rencana kerja yang akan dilaksanakan, dimana dilakukan tahapan penyusunan anggaran sama seperti dari kantor pusat dalam langkah menyusun anggaran, hanya saja untuk setiap kantor UPT lebih menekankan pada standar biaya dikarenakan harga dari suatu barang berbeda dari setiap daerah. Penyusunan rencana kerja juga disusun oleh bidang program dan ditetapkan standar biayanya oleh setiap tim kerja yang ada. Penyusunan anggaran dilakukan pada bulan 3 untuk setiap tahunnya, dari hasil rapat tersebut kemudian dibuatkan dokumen, dimana dokumen tersebut berupa dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kemudian akan dikirimkan dikantor pusat atau eselon 1 kementerian komunikasi dan informatika untuk mengesahkan dokumen anggaran yang ada di DIPA .

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran pada kementerian komunikasi dan informatika balai besar pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika makassar sudah sesuai yang telah ditetapkan oleh kantor pusat dimana dalam melakukan penetapan anggaran harus memenuhi beberapa tahapan yaitu,

1. Penetapan program dan kegiatan.

Dari penelusuran dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dapat dilihat dengan rinci indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan Ditjen. Ditjen aptika sudah menetapkan indikator terhadap semua program dan

setiap kegiatan yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) yang dibuat setiap awal perencanaan anggaran, namun *outcome* kegiatan baru dibuatkan pada akhir tahun waktu pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2. Penetapan indikator kinerja utama program dan indikator kinerja kegiatan.

Setiap kegiatan rencana strategis (renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar sudah dijelaskan indikator utama untuk setiap program namun untuk indikator kinerja kegiatan belum terlihat dengan jelas.

3. Penetapan standar biaya.

Penetapan standar biaya terhadap setiap program kerja telah disepakati oleh timkerja dan kepala bagian Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKI Makassar.

4. Pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan

Setelah proses perencanaan penganggaran selesai maka Menteri Keuangan, selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen ini adalah dasar pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang bersangkutan dan pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Dokumen pelaksanaan anggaran dituangkan dengan dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang memuat tentang Uraian Jenis belanja. Dengan adanya DIPA, pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran di tiap Kementerian/Lembaga baru bisa menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ada di dalam DIPA.

5. Pertanggungjawaban

Penggunaan dana terkait erat dengan pertanggungjawaban setiap dana yang digunakan. Hal ini merupakan suatu keharusan karena dana yang bersumber dari APBN ini adalah uang rakyat sehingga pengelolaannya harus benar dan jujur sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Apalagi pada saat ini tuntutan yang besar dari masyarakat agar pemerintah bisa mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel, sehingga pertanggungjawaban harus jelas. Proses pertanggungjawaban anggaran diawali dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Keempat karakteristik berikut ini yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki,

- a. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
- b. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.
- c. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4.2 Indikator Dalam Penyusunan Anggaran

Setiap paenyusunan anggaran mempunyai indikator dalam menyusun rencana kerja, dimana dijelaskan oleh salah satu karyawan bagian keuangan oleh Pak Hosea, sebagai berikut.

“indikator dalam penyusunan anggaran untuk setiap program kerja yang ditetapkan yaitu kebutuhan, dimana kita melihat kebutuhan utama masyarakat misalkan didaerah papua sangat membutuhkan jaringan/sinyal yang baik maka kita selaku UPT membuatkan rencana kerja guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di papua.

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita mengetahui indikator dalam penyusunan anggara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika BBPPKI Makassar adalah melihat dari kebutuhannya sendiri.

4.3 Jenis Belanja Untuk Setiap Anggaran Yang Dianggarkan.

Ada beberapa jenis belanja yang terdapat pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKI Makassar menurut salah satu pegawai keuangan yaitu.

“untuk jenis belanja disini terdapat beberapa yaitu, 1. Belanja Pegawai, biaya yang dianggarkan untuk setiap pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang ada didalam satuan kerja (satker) tersebut. 2. Belanja Barang, biaya yang dianggarkan dan digunakan untuk belanja barang yang pemakaiannya dibawah satu tahun. 3. Belanja Modal Biaya yang dianggarkan dan digunakan untuk belanja smodal yang pemakaiannya diatas satu tahun.

Dari hasil wawancara diatas terdapat 3 jenis belanja yang ada pada kementerian komunikasi dai informatika BBPPKI Makassar dalam menjalankan program kerjanya.

4.4 Pendanaan Anggaran.

Dalam menjalankan setiap rencana kerja anggaran yang didapatkan pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKI Makassar yang dielaskan oleh salah satu pegawai keuangan sebagai berikut.

“Pendanaan setiap rencana kerja (renja) pada Kementerian Komunikasi dan Iformatika, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan informatika Makassar bersumber dari Rupiah Murni dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana anggaran yang dikeluarkan oleh pemeritah diberikan langsung kepada tiap Kementerian dalam menjalankan

program rencana kerjanya (renja), kemudian dana tersebut disalurkan lagi setiap satuan kerja pemerintah/unit pelaksanaan teknis (UPT) yang ada di Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa dana yang didapatkan berasal dari rupiah murni dan APBN.

4.5 Silpa Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Jika terdapat kelebihan anggaran dalam menjalankan rencana kerja selama satu tahun, dari sisa anggaran menurut salah satu pegawai keuangan menyatakan.

“Dalam menjalankan setiap program kerja yang ada pada DIPA, anggaran yang tersisa dalam setiap kegiatan akan dikembalikan lagi ke dalam kas Negara dan akan digunakan kembali untuk penganggaran ditahun yang berikutnya.

**REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKKI Makassar.

NO	KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI ANGGARAN
1	51	BELANJA PEGAWAI	Rp 4,542,825,000	Rp 4,542,825,000	Rp 4,139,337,063
	52	BELANJA BARANG	Rp 5,251,765,000	Rp 13,681,635,000	Rp 12,353,962,325
	53	BELANJA MODAL	Rp 60,000,000	Rp 430,130,000	Rp 423,035,000
		JUMLAH ANGGARAN	Rp 9,854,590,000	Rp 18,654,590,000	Rp 16,916,334,388

Tabel 4.1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja 2015

**LAPORAN PERINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
(DALAM RUPIAH)**

Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKKI Makassar.

Kode	Program	Anggaran semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi belanja				% Realisasi anggaran	Sisa anggaran
				Bulan ini	Jumlah s/d bulan ini	Pengembalian s/d bulan ini	Jumlah neto s/d bulan ini		
3035									
52	dokumen karya riset komunikasi & informatika (001)	Rp 1,460,202,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-	0%	Rp -
52	layanan administrasi dan dukungan teknis lainnya (002)	Rp 336,762,000	Rp 261,475,000	Rp 59,593,600	Rp 95,210,500	Rp -	Rp 95,210,500	36%	Rp 166,264,500
52	dokumen pemanfaatan karya riset kominfo untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo (003)	Rp 663,175,000	Rp 388,000	Rp -	Rp 388,000	Rp -	Rp 388,000	100%	Rp -
52	peserta e-literasi masyarakat pada daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan pasca konflik (004)	Rp 818,846,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%	Rp -

52	penelitian & pengembangan komunikasi & informatika & pengembangan SDM komunikasi (005)	Rp -	Rp 1,322,853,000	Rp 184,677,900	Rp 1,116,762,220	Rp (1,530,000)	Rp 1,115,232,220	84%	Rp 207,620,780
52	output tidak ada (006)	Rp -	Rp 225,561,000	Rp 2,886,400	Rp 184,622,000	Rp -	Rp 184,622,000	81%	Rp 40,939,000
52	output tidak ada (007)	Rp -	Rp 536,821,000	Rp 19,751,200	Rp 355,613,300	Rp -	Rp 355,613,300	66%	Rp 181,207,700
52	output tidak ada (008)	Rp -	Rp 561,757,000	Rp 14,317,100	Rp 474,335,600	Rp -	Rp 474,335,600	84%	Rp 87,421,400
52	penelitian & pengembangan komunikasi & informatika & pengembangan SDM kominfo (009)	Rp -	Rp 8,800,000,000	Rp 827,393,442	Rp 8,436,712,693	Rp (180,000)	Rp 8,436,532,693	95%	Rp 363,467,307
51&52	layanan perkantoran (994)	Rp 6,515,605,000	Rp 6,515,605,000	Rp 723,755,685	Rp 5,843,599,906	Rp(12,234,831)	Rp 5,831,365,075	89%	Rp 684,239,925
53	perangkat pengelola data & komunikasi (996)	Rp -	Rp 190,330,000	Rp -	Rp 189,200,000	Rp -	Rp 189,200,000	99%	Rp 1,130,000
53	peralatan & fasilitas perkantoran (997)	Rp 60,000,000	Rp 60,000,000	Rp -	Rp 59,235,000	Rp -	Rp 59,235,000	98%	Rp 765,000
53	gedung/bangunan (998)	Rp -	Rp 179,800,000	Rp 7,950,000	Rp 174,600,000	Rp -	Rp 174,600,000	97%	Rp 5,200,000
	Jumlah Belanja	Rp 9,854,590,000	Rp 18,654,590,000	Rp1,840,325,327	Rp16,930,279,219	Rp(13,944,831)	Rp 16,916,334,388	90%	Rp1,738,255,612

Tabel 4.2 Perincian Anggaran 2015

4.6 Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2015

Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas per 31 desember 2015 dimana pada Pagu Dipa untuk belanja pegawai tersedia anggaran semula sebesar Rp 4,542,825,000 setelah direvisi sebesar Rp 4,542,825,000 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 4,139,337,063 indikator dari layanan perkantoran ini sudah cukup baik dalam pencapaiannya.

Untuk belanja barang Pagu Dipa per 31 desember 2015 dimana dana yang telah disiapkan senilai Rp 5,251,765,000 setelah direvisi sebesar Rp 13,681,635,000 dan realisasinya sebesar Rp 12,353,962,325. Untuk belanja barang tersebut dari setiap kegiatan sudah mencapai sasaran dengan baik dengan menerbitkan beberapa dokumen dan laporan yang telah direncanakan.

Untuk belanja modal disiapkan Pagu Dipa anggaran sebesar Rp 60,000,000 setelah direvisi anggaran tersedia sebesar Rp 430,130,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 423,035,000 yang berarti semua pekerjaan untuk belanja modal sudah cukup baik dalam perencanaan belanja.

Jadi, dari setiap belanja pada kementerian Komunikasi Dan Informatika Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Makassar untuk belanja tahun 2015 dari semua program kerja yang ada menunjukkan nilai capaian yang telah diharapkan dimana dalam pengelolaan anggaran telah efektif dan efisien dalam pencapaian program kerjanya dan sisa anggaran akan dikembalikan lagi kembali ke kas Negara.

**REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA
31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKKI Makassar.

NO	KODE	JENIS BELANJA	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI ANGGARAN
1	51	BELANJA PEGAWAI	Rp 4,806,352,000	Rp 4,612,702,000	Rp 4,124,390,299
	52	BELANJA BARANG	Rp 5,941,218,000	Rp 5,609,741,000	Rp 5,082,404,321
	53	BELANJA MODAL	Rp 66,000,000	Rp 66,000,000	Rp 64,680,000
		JUMLAH ANGGARAN	Rp 10,813,570,000	Rp 10,288,443,000	Rp 9,271,474,620

Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2016

**LAPORAN PERINCIAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)**

Kementerian Komunikasi Dan Informatika BBPPKKI Makassar.

Kode	Program	Anggaran semula	Anggaran setelah revisi	Realisasi belanja				% Realisasi anggaran	Sisa anggaran
				Bulan ini	Jumlah s/d bulan ini	Pengembalian s/d bulan ini	Jumlah neto s/d bulan ini		
3035									
52	hasil kajian/penelitian bagi formulasi bidang kominfo (001)	Rp 2,421,987,000	Rp 1,965,441,000	Rp 1,768,136,082	Rp 1,768,136,082	Rp -	Rp 1,768,136,082	89%	Rp 197,304,918
52	SDM bidang komunikasi & informatika yang terlatih (002)	Rp 578,173,000	Rp 711,473,000	Rp 702,715,218	Rp 702,715,218	Rp -	Rp 702,715,218	98%	Rp 8,757,782
52	masyarakat yang bertambah kemampuan TIK (003)	Rp 275,990,000	Rp 299,429,000	Rp 273,660,600	Rp 273,660,600	Rp -	Rp 273,660,600	91%	Rp 25,768,400
52	jurnal ilmiah & pranata litbang yang terakreditasi (004)	Rp 406,458,000	Rp 374,788,000	Rp 328,136,700	Rp 328,136,700	Rp -	Rp 328,136,700	87%	Rp 46,651,300

51	layanan perkantoran (994)	Rp 7,064,962,000	Rp 6,871,312,000	Rp 6,147,772,388	Rp 6,147,772,388	Rp (13,626,368)	Rp 6,134,146,020	89%	Rp 737,165,980
53	perangkat pengelola data & komunikasi (996)	Rp 66,000,000	Rp 66,000,000	Rp 64,680,000	Rp 64,680,000	Rp -	Rp 64,680,000	98%	Rp 1,320,000
	Jumlah Belanja	Rp 10,813,570,000	Rp 10,288,443,000	Rp 9,285,100,988	Rp 9,285,100,988	Rp (13,626,368)	Rp 9,271,474,620	90%	Rp 1,016,968,380

Tabel 4.4 Realisasi Anggaran Tahun 2016

4.7 Analisis Realisasi Anggaran Tahun 2016

Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas per 31 desember 2016 dimana pada Pagu Dipa untuk belanja pegawai tersedia anggaran semula sebesar Rp4,806,352,000 setelah direvisi sebesar Rp4,612,702,000 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp4,124,390,299 indikator dari layanan perkantoran ini sudah cukup baik terhadap pencapaiannya.

Untuk belanja barang Pagu Dipa per 31 desember 2016 dimana dana yang telah disiapkan senilai Rp5,941,218,000 setelah direvisi sebesar Rp5,609,741,000 dan realisasinya sebesar Rp5,082,404,321. Untuk belanja barang tersebut dari setiap kegiatan sudah mencapai sasaran dengan baik dengan menerbitkan beberapa dokumen dan laporan tiap tahunnya yang telah direncanakan.

Untuk belanja modal disiapkan Pagu Dipa per 31 desember anggaran sebesar Rp66,000,000 setelah direvisi anggaran tersedia sebesar Rp66,000,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp64,680,000 yang berarti semua pekerjaan untuk belanja modal sudah cukup baik terhadap program perencanaan belanja.

Jadi, dari setiap belanja pada kementerian Komunikasi Dan Informatika Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Makassar untuk belanja tahun 2016 dari semua program kerja yang ada menunjukkan nilai capaian yang telah diharapkan dimana dalam pengelolaan anggaran telah efektif dan efisien dalam pencapaian program kerjanya dan sisa anggaran akan dikembalikan lagi kembali ke kas Negara. Ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan perencanaan anggaran berbasis kinerja untuk setiap kegiatan dari perencanaan program satuan kerja (satker) yang disusun

akan berdampak baik untuk kedepannya tanpa adanya kekurangan anggaran yang cukup besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian dalam pembahasan yang ada diatas maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan terhadap satuan kerja yang ada pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar tahun 2015-2016 adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusun anggaran untuk setiap program kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika BBPPKI Makassar mengikuti dari kantor pusat hanya sajah kantor UPT ini lebih menekankan pada standar biaya dikarenakan harga dari barang untuk setiap daerah berbeda.
2. Dengan menggunakan sistem penyusunan anggaran berbasis kiner untuk setiap program kerja yang ada dimana untuk tahun 2015-2016 anggaran yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik atau trealisasi sesuai dengan diharapkan, dimana dalam penggunaan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

5.2 Saran

Kementerian Komunifikasi dan Informatika Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar pada tahun anggaran berikutnya disarankan hal sebagai berikut:

1. Dalam menyusun anggaran untuk rencana kerja, sangat diperlukan suatu analisa yang matang dalam menentukan anggaran untuk setiap program kerja ditahun yang akan datang.

2. Diharapkan dalam menyusun anggaran kerja untuk tahun yang akan datang kiranya semua rencana kerja yang disusun dapat trealisasi semua dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Deddi Dan Ayuningtyas. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat.
- Direktorat Penyusunan APBN. *Pokok-Pokok Siklus APBN di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran 2014.
- Hou, Yilin. 2010. *The Performance of Performance-Based Budgeting in Boom and Bust Years: An Analytical Framework and Survey of States. Prepared for Presentation at the Annual Conference of the American Society for Public Administration (ASPA) San Jose, CA, April 9-13, 2010.*
- Ismail dan Idris. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Mardiasmo. 2009. *Anggaran*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Muindro Renyowijoyo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Nordiawan & Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Peterson, William & Harahap, Ghandi. 2010. *Indonesia Infrastructure Initiative, Perencanaan Pengeluaran dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Pada Direktorat Jenderal Bina Marga*. Australia Indonesia Partnership
- PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
- PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja.
- PP No.21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
- UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Wendy, Anugrah. 2010. *"Konstruksi Wacana Nasionalisme dan Patriotisme pada Film Merah Putih (Analisis Semiotik pada Film Merah Putih)"*. Skripsi S-1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

www.anggaran.depkeu.go.id

www.kominfo.co.id